



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI KURNIAWAN**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **83151**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.770.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 388 m2/170 m2 di PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/70 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 343.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
3. MOTOR, YAMAHA ALL NEW AEROX 155/ABS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 50.650.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 237.166.104

F. HARTA LAINNYA

Rp. 10.000.000

Sub Total

Rp. 2.410.816.104

III. HUTANG

Rp. 302.217.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.108.598.304

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.